



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini memuat rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta perubahan penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2024 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2019–2024. Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM mempertimbangkan perubahan dan dinamika kondisi terkini. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2024 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Agustus 2024



KERALA DINAS,

Drs. SAMSURIJAL, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI RENJA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2024	34
2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	34
III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024	40
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	40
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	41
IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	43
4.1 Program dan Kegiatan	43
V. PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II	7
Tabel 2.1.2. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	8
Tabel 2.1.3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Antara RENJA Perubahan Dengan Renstra 2019-2024	14
Tabel 2.1.4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024	17
Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II	19
Tabel 2.1.4. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II	20
Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2023	30
Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2023.....	31
Tabel 2.2.3. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)	31
Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung	32
Tabel 2.2.5. Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	35
Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA Perubahan ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi dan dinamika baik perekonomian dan kemampuan fiskal daerah yang ada serta telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2024 serta Tema Pembangunan dan Provinsi Lampung 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 491);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2024;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2024 dengan melihat dan disesuaikan dengan perubahan dinamika perekonomian serta kemampuan fiskal daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2024 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung dengan melihat dan disesuaikan dengan perubahan dinamika perekonomian serta kemampuan fiskal daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan RENJA Perubahan perangkat daerah tahun 2024

1.4.4 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2024.

1.4.5 BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA

❖ Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah (IKU) Daerah Tahun 2024 Triwulan II

Dibawah ini adalah realisasi capaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 Triwulan II

Tabel 2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18	18,19 %	50,28 %
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	5,71	4,31 %	75,43%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA / IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah memenuhi harapan dimana dari ke 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 36,18 persen yang ditargetkan di tahun 2024 tercapai 18,19 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 50,28 persen. Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari target sebesar 5,71 persen terealisasi 4,31 persen atau sebesar 75,43 persen. Hal ini sudah sangat baik dan sudah pada jalurnya mengingat ini masih periode awal pelaksanaan kegiatan dimana masih banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Pencapaian ini

tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak yang telah bekerja keras dalam membina dan membangun koperasi dan umkm yang ada di Provinsi Lampung.

❖ **Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Tabel 2.1.2. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kelompok Koperasi yang mengurus Izin simpan pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitas Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan Pembukaan Cabang/Kantor Koperasi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya tatakelola koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARA N	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRA M	SASARA N PROGRA M	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARA N KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARA N SUB KEGIATA N	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	an Peratur an Perunda ng- Undang an	Undangan			
						Pemeriksa an dan Pengawas an Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota annya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningk atnya Koperas i Simpan pinjam Yang Menera pkan Peratur an Perkope rasian Yang Sesuai Ketentu an Peratur an Perunda ng- Undang an	Pemeriksa an dan Pengawas an Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota annya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksana an dan pemeriks aan dan pengawas an koperasi yang wilayah keanggot anannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Mening katnya Kepatuhan Koperas i Simpan pinjam Terhada p Peratur an Perund ang- Undang an dan Terbent uknya Koperas i yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tanggu h, serta Akuntab el	Pelaksana aan pemeriks aan dan pengawas an koperasi yang wilayah keanggot anannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
			Progra m Penilaian Kesehat an Ksp/Us p Koperas i	Mening katnya Koperas i Yang Berkata gori Sehat	Persentas e Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan nya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggota an Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Uni t Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota anya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningk atnya Kesehat an KSP/US P	Persentas e KSP/USP Yang Dinilai Kesehatan nya	Penilaian Kesehata n Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan , dan Permodal an	Terukur nya Tingkat Kesehat an Koperas i	Jumlah Koperasi Hasil Pengukur an Tingkat Kesehata n
			Progra m Pendid kan Dan Latihan Perkope rasian	Mening katnya Kualitas SDM Koperas i	Persentas e SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidika n dan Latihan Perkopera sian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggota an Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkopera sian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningk atkan Pengeta huan Kompet ensi SDM Koperas i	Persentas e SDM Koperasi Yang Meningkat Kompeten si dan Pengetahu annya	Peningkat an Pemaham an dan Pengetah uan Perkoper asian serta Kapasitas dan Kompeten si SDM Koperasi	Mening katnya Pemaha man dan Pengeta huan Perkope rasian serta Kapasit as dan Kompet ensi SDM Koperas i	Jumlah SDM yang Memaha mi Pengetah uan Perkoper asian
			Progra m Pember dayaan dan Perlindu ngan Koperas	Mening katnya Pember dayaan dan Perlindu ngan Usaha	Persentas e Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampi ngan dan	Pemberda yaan dan Perlindu ngan Koperasi yang Keanggota annya	Meningk atnya Perlindu ngan Dan Skala Usaha Koperas	Persentas e Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengemba ngan dan Perlindung	Peningkat an Produktivi tas Nilai Tambah Akses Pasar Akses	Mening katnya Produkti vitas, Nilai Tambah , Akses Pasar.	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			i	Koperasi	Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	i	an Usaha	Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Pendataan Melalui Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Daya Saing Ukm Dan Menuju kembangkan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatkan Skala Usaha Ukm	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedia any a Bahan Bacaan dan Peraturan Perund ang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perund an g-Undangan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan Material	Tersedia any a Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaks ananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaks ananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia any a Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia any a Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia any a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan	Tersedia any a Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									n Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

❖ **Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan 2024 dengan Renstra 2019-2024**

Dari tabel 2.1.3 dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, terdapat 4 sub kegiatan yang tidak ada di Renja Perubahan tahun 2024 tetapi sub kegiatan tersebut ada pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga sub kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Berikut ini adalah rinciannya :

Tabel 2.1.3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan 2024 dengan Renstra 2019-2024

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2.	17.					BIDANG KOPERASI DAN UKM			

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	X	
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	X	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	02.	1.	02.		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	√	√	
2.	17.	05.				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	
2.	17.	07.				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	02.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	√	√	
2.	17.	08.				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	

❖ **Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024**

Dibawah ini adalah tabel perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara RENJA Perubahan 2024 dengan APBD Murni Tahun 2024. Dari tabel 2.1.4 dibawah dapat dilihat bahwa pada Renja Perubahan tahun 2024, terdapat 2 kegiatan dan 2 sub sub kegiatan yang tidak ada di APBD murni tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya optimlasisasi anggaran yang ada sehingga kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 2.1.4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perubahan 2024 Perangkat Daerah Dengan APBD Murni Tahun 2024

KODE REK						URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
2.						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2.	17.					BIDANG KOPERASI DAN UKM			
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	X	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	X	
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	X	

KODE REK						URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	X	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	√	√	
2.	17.	05.				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	KET
						PERLINDUNGAN KOPERASI			
2.	17.	06.	1.	01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	
2.	17.	07.				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	02.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	√	√	
2.	17.	08.				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	

❖ Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2024 s/d triwulan II. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja baik fisik maupun keuangan kegiatan tahun 2024 triwulan II dengan realisasi kinerja fisik maupun keuangan kegiatan di tahun 2024 triwulan II dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 triwulan II.

Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	39,41	39,41
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100	6,90	6,90
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100	31,82	31,82
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100	0	0

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100	0	0
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	12,54	12,54
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100	44,05	44,05
8	Program Pengembangan UMKM	100	10,02	10,02
	RATA-RATA JUMLAH	100	27,35	27,35

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sangat rendah yaitu hanya 27,35 persen. Realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 39,41 persen dan terendah ada pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 0 persen

Tabel 2.1.5. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan II

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN (PERSEN)
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	50,00	50,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	46,70	37,79	80,92
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	47,17	36,96	78,35
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	78,57	61,63	78,44
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26,55	12,40	46,70
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	23,58	11,04	46,82
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,5	0,28	56,00
8	Program Pengembangan UMKM	10,91	7,09	64,99
	RATA-RATA JUMLAH			62,77

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 triwulan II sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rata-rata sebesar 62,77 persen dengan capaian terendah ada pada Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 46,82 persen sedangkan capaian tertinggi ada pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 80,92 persen. Adapun realisasi capaian kinerja

kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian terlampir).

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.532.662.623,62 terealisasi sebesar Rp. 4.938.744.409,00 terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173.969.000,00 terealisasi sebesar 6,78 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.000.000,00 terealisasi sebesar 3,86 persen dengan indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen terealisasi sebesar 60 persen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 33.969.000,00 terealisasi sebesar 18,81 persen dengan indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan terealisasi sebesar 63,64 persen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.018.564.632,00 terealisasi sebesar 44,02 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.943.564.532,00 terealisasi sebesar 44,30 persen dengan indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan dan terealisasi sebanyak 52,05 persen
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 5 persen dengan indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen terealisasi sebesar 50 persen

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar 10,73 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan terealisasi sebesar 50 persen

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 5,33 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan terealisasi sebesar 47,06 persen

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 45.000.000,00 terealisasi sebesar 4,03 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar 4,70 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 50 persen

b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar 3,50 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 50 persen

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang terealisasi sebesar 0 persen
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 650.186.791,62,00. terealisasi sebesar 21,07 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,00 terealisasi sebesar 67,44 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,00 terealisasi sebesar 44,48 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 16.526.991,62,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 50 persen
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,00 terealisasi sebesar 47,04 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket terealisasi sebesar 50 persen
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 46.080.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 437.580.000,00 terealisasi sebesar 14,48 persen dengan

indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 0 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 755.490.000,00 terealisasi sebesar 39,89 persen dengan indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 216.000.000,00 terealisasi sebesar 35,30 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 539.490.000,00 terealisasi sebesar 41,65 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 50 persen
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,00 terealisasi sebesar 16,75 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,00 terealisasi sebesar 7,30 persen dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 50 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,00 terealisasi sebesar 28,71 persen dengan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit terealisasi sebesar 55,56 persen
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 0 persen
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 0 persen

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 365.988.000,00 terealisasi sebesar 6,90 persen terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 12,63 persen dengan indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

a) Sub kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 12,63 persen dengan dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 16 unit usaha terealisasi sebesar 68,75 persen

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 188.528.000,00 terealisasi sebesar 31,82 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 50 persen
- 2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Ksp Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 722 orang terealisasi sebesar 0 persen

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 3,69 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha terealisasi sebesar 28,57 persen

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 44,05 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 44,05 persen indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 899.995.000,00 terealisasi sebesar 49,68 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 35 unit usaha terealisasi sebesar 42,86 persen
- b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 115.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang terealisasi sebesar 0 persen

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 10,02 persen dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit

Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha terealisasi sebesar 33,33 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi (unit)	4.751	4.932	5.099	5.325	5.340	5.341	5.423	5.653	5.862	6.005	6.101
Jumlah Anggota (orang)	412.617	683.523	586.937	887.537	681.026	772.968	455.374	2.273.853	658.667	947.645	2.488.290
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1.940	2.095	2.246	3.121	2.471	2.476	2.016	2.087	2.282	2.426	2.263
Jumlah Koperasi RAT (unit)	370	548	583	791	643	673	5.99	748	734	791	800

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit. Pada tahun 2023 koperasi aktif kembali meningkat menjadi meningkat menjadi 2.426 unit.

Berdasarkan jenisnya koperasi di Provinsi Lampung masih didominasi oleh koperasi konsumen dimana sebesar 47,96 persen atau 2.926 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Sedangkan koperasi paling sedikit yaitu koperasi sektor jasa sebanyak 3,09 persen atau 189 unit koperasi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community*

based tourism seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2023

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Produsen	1.956	500	1.456
2.	Pemasaran	118	57	61
3.	Konsumen	2.926	1.108	1.818
4.	Jasa	189	115	74
5.	Simpan Pinjam	912	483	429
	Jumlah	6.101	2.263	3.838

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Provinsi Lampung jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 2.488.290 orang pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bekerjasama dengan BPS melakukan pendataan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha di Provinsi Lampung dan menghasilkan sebuah data tunggal UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas data khususnya data UMKM di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah tabel jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan Sistem Data Tunggal Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 2.2.3. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)

No	Kabupaten	Skala Usaha			
		Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	Jumlah
1	KAB. LAMPUNG BARAT	20,308.00	187.00	26.00	20,521.00
2	KAB. TANGGAMUS	27,798.00	2.00	1.00	27,801.00
3	KAB. LAMPUNG SELATAN	41,172.00	-	1.00	41,173.00
4	KAB. LAMPUNG TIMUR	33,519.00	4.00	5.00	33,528.00
5	KAB. LAMPUNG TENGAH	60,841.00	4.00	3.00	60,848.00
6	KAB. LAMPUNG UTARA	28,655.00	1.00	-	28,656.00
7	KAB. WAY KANAN	58,001.00	-	3.00	58,004.00
8	KAB. TULANG	31,880.00	494.00	54.00	32,428.00

No	Kabupaten	Skala Usaha			
		Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	Jumlah
	BAWANG				
9	KAB. PESAWARAN	43,021.00	278.00	31.00	43,330.00
10	KAB. PRINGSEWU	45,246.00	401.00	36.00	45,683.00
11	KAB. MESUJI	16,238.00	177.00	18.00	16,433.00
12	KAB. TULANG BAWANG BARAT	23,479.00	249.00	22.00	23,750.00
13	KAB. PESISIR BARAT	10,512.00	98.00	11.00	10,621.00
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	30,934.00	2.00	4.00	30,940.00
15	KOTA METRO	18,917.00	305.00	48.00	19,270.00
	Jumlah	490,521.00	2,202.00	263.00	492,986.00

Sumber : SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023

Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	KOTA
KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
6	Maryam (Bordir)	Lampung Selatan
7	Agung (Kaos Sakai)	Bandar Lampung
8	Poningsih (Sulam Usus)	Bandar Lampung
9	Nazruddin Habi (Sulam Usus)	Lampung Selatan
KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
8	Lusi (Bandeng)	Bandar Lampung
9	Maya (Sambel Bawang)	Bandar Lampung
10	Windu (Kue Jajan Pasar)	Bandar Lampung
11	Nunung (Kremes, Dawet)	Bandar Lampung
12	Bayu (Lapis Legit)	Lampung Selatan
13	Iskandarsyah (Kopi Anjosia)	Bandar Lampung
14	Rido (Kopi Ridho)	Bandar Lampung
15	Nasrullah (Kopi Naire)	Bandar Lampung
16	Winarko (Susu Kambing)	Metro
KATEGORI BATIK		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
4	Sulastri (Batik Tulis)	Bandar Lampung
KATEGORI FURNITURE		

NO	NAMA UMKM	KOTA
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung
KATEGORI HANDICRAFT		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
6	Ernita (Tapis)	Bandar Lampung
7	Desi Impiyani (Citra Tapis)	Bandar Lampung
KATEGORI SPA DAN HERBAL		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2023

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM serta Iklim Usaha yang Belum Kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian, rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, rendahnya kewirausahaan, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
3. Masih rendahnya kewirausahaan khususnya untuk generasi muda

4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk
5. Masih rendahnya peran perempuan dalam aktifitas ekonomi serta adanya disparitas gender antara laki-laki dan perempuan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2024

Rancangan RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu perbedaan (pengurangan/penambahan) pagu antar sub kegiatan dengan karena menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu adanya perubahan peraturan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 ini berdasarkan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan sehingga ada penyesuaian nomenklatur kegiatan/sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Forum Perangkat Daerah Urusan Koperasi dan UKM merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*)

pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Provinsi. Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Lampung dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Provinsi Lampung. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5. Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Diklat Lobster Air Tawar karena usaha lobter air tawar, modal kecil, potensi dan laba tinggi peminat ribuan	(kecamatan kemiling, langkapura, rajabasa, KOTA BANDAR LAMPUNG)	DITOLAK (Dinas Perikanan)
2	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Adanya Produk UMKM Pekon Napal yang susah akan di pasarkan, sehingga butuh pelatihan UMKM.	(Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, KAB.	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP. Pelatihan bersama usulan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	LOKASI	KETERANGAN
	MIKRO (UMKM)	Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		TANGGAMUS)	Pokir dari Bapak Mukhlis Basri, M.Si, H. SUPRIADI HAMZAH, SH, H. HENI SUSILO sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta (menyesuaikan)
3	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	tingginya animo masyarakat dalam bergotong royong, `serta `spirit para pemuda dalam usaha dan rasa keingintahuan tentang Manajemen koperasi dan UMKM namun belum terfasilitasi oleh pemerintah dalam pelatihan koperasi dan UMKM	(kampung tri makmur jaya kecamatan menggala timur kabupaten tulang bawang, KAB. TULANG BAWANG)	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP. Pelatihan sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta (usulan nomor 3, 4 dan 6 digabung menjadi 1 kegiatan pelatihan)
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	tingginya animo masyarakat dalam bergotong royong, `serta `spirit para pemuda dalam usaha dan rasa keingintahuan tentang Manajemen koperasi dan UMKM namun belum terfasilitasi oleh pemerintah dalam pelatihan koperasi dan UMKM	(tiuh bumi asri kec way kenanga kab tubaba, KAB. TULANG BAWANG BARAT)	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP. Pelatihan sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta (usulan nomor 3, 4 dan 6 digabung menjadi 1 kegiatan pelatihan)
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Tingginya animo dan antusias para pemuda dalam berwirasusaha, namun kurangnya ilmu pengetahuan dalam manajemen usaha, sehingga tidak ada nilai tambah pada produk usaha yang dibuat	(kampung bawang sakti jaya kec banjar baru kab tulang bawang, KAB. TULANG BAWANG)	Gabung dengan 346
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	tingginya animo masyarakat dalam bergotong royong, `serta `spirit para pemuda dalam usaha dan rasa keingintahuan tentang Manajemen UMKM namun belum terfasilitasi oleh pemerintah dalam pelatihan UMKM	(kampung wonorejo kec gunung agung kab tubaba, KAB. TULANG BAWANG)	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP. Pelatihan sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta (usulan nomor 3, 4 dan 6 digabung menjadi 1 kegiatan pelatihan)
7	PROGRAM Pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang	Permohonan bantuan dana pada	(Pekon Pasir Ukir, Kec.	DITOLAK (Diusulkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	LOKASI	KETERANGAN
	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM KUB & MAJU BERSAMA&	Pagelaran, Kab. Pringsewu, KAB. PRINGSEWU)	melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)
8	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Bantuan pelatihan pemasaran umkm dan bantuan berupa modal	(Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, KAB. TANGGAMUS)	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP untuk pelatihan, sedangkan untuk bantuan tidak ada. Pelatihan bersama usulan Pokir dari Bapak Mukhlis Basri, M.Si, H. SUPRIADI HAMZAH, SH, H. HENI SUSILO sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta
9	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Belum ada nya mesin tiwul untuk memperkembangkan UMKM didesa rantau jaya ilir kecamatan putra rumbia	(Dusun 03 RT 05 RW 00 DESA RANTAU JAYA ILIR KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KAB. LAMPUNG TENGAH)	DITOKAL (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH) dialihkan kedinas perindag
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kurangnya modal untuk membuka usaha	(Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan, KAB. PESAWARAN)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)
11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	menueunnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal (Bidang Kesenian)	(Desa Banguun rejo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, KAB. LAMPUNG SELATAN)	DITOLAK (DINAS PARIWISATA)
12	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Peran serta pengembangan budidaya madu lebah dengan menjaga kearifan lokal oleh masyarakat perlu	(Desa Karang Jaya, Kec. Merbau Mataram, KAB. LAMPUNG SELATAN)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH) DINAS PETERNAKAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	LOKASI	KETERANGAN
		Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	mendapat dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas perekonomian setempat dan UMKM		
13	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peran serta pengembangan ekonomi kearifan lokal oleh masyarakat perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas perekonomian setempat dan UMKM	(Desa Budidaya, Kec. Sidomulyo, KAB. LAMPUNG SELATAN)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH) DINAS PERINDAG
14	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peran serta pengembangan pariwisata lokal oleh masyarakat perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas perekonomian setempat dan UMKM	(Desa Rejosari, Kec. Natar, KAB. LAMPUNG SELATAN)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH) DINAS PARIWISATA
15	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peran serta pengembangan pariwisata lokal oleh masyarakat perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas perekonomian setempat dan UMKM	(Desa Taman Baru, Kec. Penengahan, KAB. LAMPUNG SELATAN)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH) DINAS PARIWISATA
16	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	PERMOHONAN BANTUAN MESIN UMKM KELOMPOK (ALAT PEMBUAT KAPAL) USAHA PEMBUATAN KAPAL MOTOR	(JL. ZA PAGAR ALAM, RT 16 RK 05 DESA WIRALAGA II KECAMATAN MESUJI, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG - 34697, KAB. MESUJI)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)
17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	PERMOHONAN BANTUAN MESIN UMKM KELOMPOK (UMKM SELUANG) MESIN PENGGILING DAGING IKAN DAN PENCETAK	(JL. ZA PAGAR ALAM, RT 16 RK 05 DESA WIRALAGA II KECAMATAN MESUJI, KABUPATEN	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	LOKASI	KETERANGAN
			KRUPUK USAHA PENGOLAHAN IKAN	MESUJI, PROVINSI LAMPUNG - 34697, KAB. MESUJI)	
18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	PERMOHONAN BANTUAN MESIN UMKM KELOMPOK (UMKM SELUANG) MESIN PENGGILING DAGING IKAN DAN PENCETAK KRUPUK USAHA PENGOLAHAN IKAN	(JL. ZA PAGAR ALAM, RT. 16 RK 05 DESA WIRALAGA II KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI, KAB. MESUJI)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)
19	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	banyak warga yang mengalami PHK dan kesulitan ekonomi dampak dari Covid 19	(masyarakat kelurahan Kelapa Tiga Permai kecamatan Tanjung karang Barat Kota Bandar Lampung, KOTA BANDAR LAMPUNG)	DITOLAK (usulan tidak jelas)
20	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Kekurangan modal, butuh pendampingan dalam mengelola usaha	(Jln ikan julung RT 014,LK 1 Kel bumi waras, Kec bumi waras, Bandar Lampung, KOTA BANDAR LAMPUNG)	DITOLAK (Diusulkan melalui mekanisme HIBAH ke Dinas koperasi dan UKM)
21	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Masih minimnya pemahaman di Masyarakat akan Perpeerannya UMKM di Masyarakat	(Pekon Kutadalom Kec Gisting Kab. Tanggamus, KAB. TANGGAMUS)	Usulan diakomodir melalui UPTD BALAIKOP. Pelatihan bersama usulan Pokir dari Bapak Mukhlis Basri, M.Si, H. SUPRIADI HAMZAH, SH, H. HENI SUSILO sebanyak 1 angkatan 40 orang peserta (menyesuaikan)

III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, pemerintah telah merancang tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Prioritas Pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2024 mendatang. Tema RKP tahun 2024 adalah **“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sejalan dengan Prioritas Nasional dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 maka pemerintah Provinsi Lampung telah merancang Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu **“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM Menuju Rakyat Lampung Berjaya”**. Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 6 (enam) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan”**. 6 (enam) Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religious, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam RPJMN, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyusun Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024 yaitu **Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inofatif.**

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024 (SEBELUM PERUBAHAN)	TARGET TAHUN 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 . Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18	36,18
		1 . Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	5,71	8,57

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

4.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 ini berdasarkan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Perubahan (Lampiran 4.1) :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 11.800.508.766,96,- terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 49.913.000,- Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 23.050.000,- indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.863.000,- indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.043,701.525,34,- Indikatornya adalah Persentase Layanan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.006.201.525,34,- indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 73 orang/bulan
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 15.000.000,- indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 7.500.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 15.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 22.500.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 12.500.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 0,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah sebanyak 0 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 0,- indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 0 orang (optimalisasi anggaran)
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 446.906.241,62 Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,- indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,- indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 16.991.598,62,- indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,- indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 23.040.000,- indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 256.874.843,- indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0,- indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 0,- indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 0 unit (optimalisasi anggaran)
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 777.822.000,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 228.552.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 549.270.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,- indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit

- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,- indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 369.988.000, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,- indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 15 unit usaha
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 45.899.200,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 45.899.200,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 18 unit usaha

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 134.988.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. C dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Penguatan tatakelola kelembagaan koperasi Rp. 45.899.200,- dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tatakelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 koperasi
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,- dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi Yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan sebanyak 30 unit usaha

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,- indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,- indikatornya adalah Jumlah koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan sebanyak 30 unit usaha

**4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 4.953.690.000,-
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :**

- 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 4.953.690.000,- indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 5.191.677.000,- indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 702 orang

5. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 181.660.050,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 181.660.050,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 181.660.050,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 891.005.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan

dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 891.005.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 796.005.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 90 unit usaha
- b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 95.000.000,- indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 40 orang

7. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,- dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha

V. PENUTUP

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2024 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

MATRIK RENJA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							20,362,676,623.62	19,423,739,016.96	(938,937,606.66)		
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhiya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 persen		Persentase Terpenuhiya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 persen		12,532,662,623.62	11,800,508,766.96	(732,153,856.66)		
2.17.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		173,969,000.00	49,913,000.00	(124,056,000.00)		
2.17.01.101.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	Prov. Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	Prov. Lampung	140,000,000.00	23,050,000.00	(116,950,000.00)	APBD-P	
2.17.01.101.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapora Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Lapora Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	Prov. Lampung	33,969,000.00	26,863,000.00	(7,106,000.00)	APBD-P	
2.17.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		10,018,564,532.00	10,043,701,525.34	25,136,993.34		
2.17.01.102.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang	Prov. Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang	Prov. Lampung	9,943,564,532.00	10,006,201,525.34	62,636,993.34	APBD-P	
2.17.01.102.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	Prov. Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	Prov. Lampung	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	APBD-P	
2.17.01.102.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Prov. Lampung	15,000,000.00	7,500,000.00	(7,500,000.00)	APBD-P	
2.17.01.102.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	Prov. Lampung	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	APBD-P	
2.17.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen		45,000,000.00	22,500,000.00	(22,500,000.00)		
2.17.01.103.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Prov. Lampung	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	APBD-P	
2.17.01.103.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Prov. Lampung	25,000,000.00	12,500,000.00	(12,500,000.00)	APBD-P	
2.17.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		22,332,000.00	-	(22,332,000.00)		
2.17.01.105.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	Prov. Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	Prov. Lampung	22,332,000.00	-	(22,332,000.00)	APBD-P	
2.17.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		650,186,791.62	446,906,241.62	(203,280,550.00)		
2.17.01.106.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	16,310,400.00	16,310,400.00	-	APBD-P	
2.17.01.106.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	11,239,800.00	11,239,800.00	-	APBD-P	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.01.106.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Prov. Lampung	16,526,991.62	16,991,598.62	464,607.00	APBD-P	
2.17.01.106.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	Prov. Lampung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	Prov. Lampung	122,449,600.00	122,449,600.00	-	APBD-P	
2.17.01.106.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Prov. Lampung	46,080,000.00	23,040,000.00	(23,040,000.00)	APBD-P	
2.17.01.106.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Prov. Lampung	437,580,000.00	256,874,843.00	(180,705,157.00)	APBD-P	
2.17.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		407,454,300.00	-	(407,454,300.00)		
2.17.01.107.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 unit	Prov. Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	Prov. Lampung	407,454,300.00	-	(407,454,300.00)	APBD-P	
2.17.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		755,490,000.00	777,822,000.00	22,332,000.00		
2.17.01.108.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Prov. Lampung	216,000,000.00	228,552,000.00	12,552,000.00	APBD-P	
2.17.01.108.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Prov. Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Prov. Lampung	539,490,000.00	549,270,000.00	9,780,000.00	APBD-P	
2.17.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		459,666,000.00	459,666,000.00	-		
2.17.01.109.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Prov. Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Prov. Lampung	205,476,000.00	205,476,000.00	-	APBD-P	
2.17.01.109.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	Prov. Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	Prov. Lampung	215,990,000.00	215,990,000.00	-	APBD-P	
2.17.01.109.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	Prov. Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	Prov. Lampung	16,660,000.00	16,660,000.00	-	APBD-P	
2.17.01.109.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Prov. Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Prov. Lampung	21,540,000.00	21,540,000.00	-	APBD-P	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46.7 persen		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46.7 persen		365,988,000.00	336,887,200.00	(29,100,800.00)		
2.17.02.101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen		Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen		165,988,000.00	290,988,000.00	125,000,000.00		
2.17.02.101.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 unit usaha	Prov. Lampung	165,988,000.00	290,988,000.00	125,000,000.00	APBD-P	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.02.102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya	100 persen		Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya	100 persen		200,000,000.00	45,899,200.00	(154,100,800.00)		
2.17.02.102.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	18 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	18 unit usaha	Prov. Lampung	200,000,000.00	45,899,200.00	(154,100,800.00)	APBD-P	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	47.17 persen		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	47.17 persen		188,528,000.00	134,988,000.00	(53,540,000.00)		
2.17.03.101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen		Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen		113,528,000.00	59,988,000.00	(53,540,000.00)		
2.17.03.101.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi	30 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi	30 unit usaha	Prov. Lampung	113,528,000.00	59,988,000.00	(53,540,000.00)	APBD-P	
2.17.03.102	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen		Persentase Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen		75,000,000.00	75,000,000.00	-		
2.17.03.101.0002	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	30 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	30 unit usaha	Prov. Lampung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	APBD-P	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	78.57 persen		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	78.57 persen		175,000,000.00	175,000,000.00	-		
2.17.04.101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya	100 persen		Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya	100 persen		175,000,000.00	175,000,000.00	-		
2.17.04.101.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tatakelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	30 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	30 unit usaha	Prov. Lampung	175,000,000.00	175,000,000.00	-	APBD-P	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55 persen		Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55 persen		5,191,677,000.00	4,953,690,000.00	(237,987,000.00)		
2.17.05.101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	100 persen		Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	100 persen		5,191,677,000.00	4,953,690,000.00	(237,987,000.00)		
2.17.05.101.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	845 orang	Prov. Lampung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	702 orang	Prov. Lampung	5,191,677,000.00	4,953,690,000.00	(237,987,000.00)	APBD-P	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.58 persen		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.58 persen		318,866,000.00	306,660,050.00	(12,205,950.00)		
2.17.06.101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha	100 persen		Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha	100 persen		318,866,000.00	306,660,050.00	(12,205,950.00)		
2.17.06.101.0002	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75 unit usaha	Prov. Lampung	318,866,000.00	306,660,050.00	(12,205,950.00)	APBD-P	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 rasio		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 rasio		1,014,955,000.00	1,141,005,000.00	126,050,000.00		
2.17.07.101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kenentingan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	100 persen		Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	100 persen		1,014,955,000.00	1,141,005,000.00	126,050,000.00		
2.17.07.101.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	90 unit usaha	Prov. Lampung	899,955,000.00	796,005,000.00	(103,950,000.00)	APBD-P	
2.17.07.101.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	40 UKM	Prov. Lampung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 UKM	Prov. Lampung	115,000,000.00	345,000,000.00	230,000,000.00	APBD-P	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	10.91 persen		Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	10.91 persen		575,000,000.00	575,000,000.00	-		
2.17.08.101	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	100 persen		Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	100 persen		575,000,000.00	575,000,000.00	-		
2.17.08.101.0001	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 unit usaha	Prov. Lampung	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 unit usaha	Prov. Lampung	575,000,000.00	575,000,000.00	-	APBD-P	
JUMLAH								20,362,676,623.62	19,423,739,016.96	(938,937,606.66)		

BANDAR LAMPUNG, 9 AGUSTUS 2024

Kepala Dinas,


Drs. SAMSURIJAL, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003